



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZUDAN ARIF FAKRULLOH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 144981

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.185.358.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 491.628.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/162 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 632.016.000
3. Tanah Seluas 197 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 98.500.000
4. Tanah Seluas 1.609 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 952.770.000
5. Tanah Seluas 476 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 220.864.000
6. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 272.832.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 446.748.000
8. Tanah Seluas 1.330 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
9. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, WARISAN Rp. 40.000.000
10. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 250.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA



SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA

SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	832.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.589.790.793
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.607.448.793
III. HUTANG	Rp.	841.513.685
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.765.935.108

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.